

A. Lampiran Rencana Kinerja Tahunan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET 2025	TARGET KINERJA (TRIWULAN)				RINCIAN AKTIVITAS	RISIKO PENUGASAN	ANGGARAN	SATUAN	PELAKSANA	TARGET KEGIATAN (TRIWULAN)			
						I	II	III	IV						I	II	III	IV
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Realisasi Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	92,03	10	25	45	12,03	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Minimnya sarana prasarana sebagai akibat luas jangkauan wilayah	1.625.000.000	4 kali	Bidang Pajak	20	40	30	10
										Pelaksanaan <i>door to door service</i>	Minimnya petugas penagihan yang berbasis kompetensi juru sita	2.000.000.000	8 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
										Optimalisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor	Jangkauan wilayah perairan sungai	589.450.500	2 kali	Bidang Pajak	25	30	25	20
2.	Meningkatnya Kredibilitas Penerimaan Pendapatan Dari Perencanaan Awal	1.1	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD Dalam Batas Toleransi	%	5,00	0,5	2,5	1,0	1,0	Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah	Terbatasnya sumber potensi penerimaan pajak daerah	734.392.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15	30	45	10
3.	Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap PDRB	1.1	Rasio PAD Terhadap PDRB Non Migas	Rasio	0,96	0,2	0,4	0,3	0,06	Diversifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya tunggakan penerimaan pajak daerah	589.450.500	1 kali	Bidang Pajak	25	10	55	10
		1.2	Rasio PAD Terhadap PDRB Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Daerah	Rasio	1,12	0,12	0,5	0,3	0,2	Intensifikasi penerimaan pajak daerah	Masih terdapatnya wajib pajak yang non aktif	100.000.000	2 kali	Bidang Pajak	10	30	50	10
4.	Meningkatnya Rasio Pajak Daerah	1.1	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap GDP	%	1,61	0,61	0,5	0,5	0	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Minimnya sarana prasarana media penyampaian diseminasi pajak daerah	2.000.000.000	4 kali	Bidang Pajak	10	50	20	20
5.	Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Subjek Pajak Daerah	%	14,53	4,53	3	4	3	Penetapan wajib pajak daerah	Masih terdapatnya objek wajib pajak baru yang belum ditetapkan	175.000.000	1 kali	Bidang Pajak	5	25	60	10
6.	Berkurangnya Doleansi Pajak Daerah	1.1	Persentase berkurangnya pengajuan doleansi pajak	%	5,19 %	1,19	2	1	1	Penagihan pajak daerah	Masih terdapatnya pengajuan doleansi pajak daerah	589.450.500	2 kali	Bidang Pajak	15	35	45	5

7.	Berkurangnya Kesalahan Dalam Ikhtisar Pembukuan Pajak Daerah	1.1	Persentase meningkatnya ketelitian ikhtisar pembukuan pajak	%	100 %	25	25	25	25	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan dalam pembukuan dan pelaporan pajak daerah	100.000.000	4 kali	Bidang Pajak	25	25	25	25
8.	Meningkatnya Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain Dalam APBD	1.1	Rasio PAD Terhadap Penerimaan Lain lain	Rasio	95,12	20	25	45	5,12	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya potensi retribusi yang belum digali untuk peningkatan PAD	121.266.000	2 kali	Bidang PDLL	5	15	60	20
9.	Meningkatnya Pendapatan Retribusi Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Retribusi Terhadap Target	%	89,45	10	30	40	9,45	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kerjasama pemanfaatan terhadap objek retribusi masih belum optimal	637.400.000	1 kali	Bidang PDLL	10	60	20	10
10.	Meningkatnya Pendapatan dari Penerimaan Bagi Hasil	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Bagi Hasil	%	83,71	25	10	35	13,71	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Pola intensifikasi belum optimal terhadap penerimaan pusat	220.000.000	4 kali	Bidang PDLL	15	15	60	10
11.	Meningkatnya Penerimaan dari Hibah	1.1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Hibah	%	84,42	10	40	20	14,42	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Belum optimalnya penerimaan hibah	210.000.000	4 kali	Bidang PDLL	20	20	45	15
12.	Meningkatnya Level Maturitas Pengendalian Intern Pengawasan Pendapatan Daerah	1.1	Level Maturitas Pengendalian Intern (0 - 5)	Nilai	3	3	3	3	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Belum optimalnya penerapan pengendalian intern pemerintah	375.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20
13.	Meningkatnya Pemeriksaan atas Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Intensitas Pemeriksaan	%	92,64	10	35	35	12,64	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Belum optimalnya pengawasan pajak daerah dan retribusi daerah	50.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20
14.	Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian atas Temuan Penyimpangan Pelanggaran Dalam	1.1	Persentase Berkurangnya Tindak Lanjut Penyelesaian	%	17,03	5,03	5	4	3	Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Masih terdapatnya pelanggaran dalam pendapatan daerah	50.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	5	45	30	20

	Pendapatan Daerah																	
15.	Berkurangnya Tindakan Represif untuk Penertiban Keamanan dalam Pelaksanaan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tindakan Refresif	%	12,88	3,88	2	4	3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Masih terdapatnya pelaksanaan yang belum tertib sesuai dengan SOP	375.000.000	2 kali	Bidang Pengawasan dan Pembinaan	15	40	25	20
16.	Meningkatnya Penggalan Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	81,89	15	25	25	15,89	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Pengembangan pajak daerah belum sepenuhnya mengacu pada kemampuan dan kapasitas daerah	1.150.000.000	1 kali	Bidang P2PATDA	5	65	20	10
17.	Meningkatnya Objek Penelitian Potensi Pendapatan Asli Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penelitian Objek Potensi Pendapatan Asli Daerah	%	83,69	10	20	30	23,69	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Penelitian berbasis atas daya dukung daerah belum optimal	734.392.000	1 kali	Bidang P2PATDA	10	25	35	30
18.	Meningkatnya Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	93,41	10	20	30	33,41	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Belum optimalnya penggalan sumber retribusi baru bagi daerah	121.266.000	4 kali	Bidang P2PATDA	5	35	45	10
19.	Deregulasi Kebijakan Dalam Penetapan Sumber Potensi	1.1	Persentase Meningkatnya Peraturan yang Diharmonisasi	%	100,00	25	25	25	25	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kebijakan yang belum diharmonisasi terkait dengan kebijakan investasi daerah	637.400.000	1 kali	Bidang P2PATDA	15	15	65	5
20.	Meningkatnya Dukungan Sekretariat Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Pertanggungjawaban Keuangan	%	94,83	20	20	30	24,83	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Masih terdapatnya jurnal koreksi atas pertanggungjawaban keuangan	300.000.000	4 kali	Sekretariat	10	40	30	20
		1.2	Persentase Efisiensi dan Efektifitas	%	5,02	1	2	1	1,02	Penyusunan Dokumen	Masih terdapatnya GAP antara	100.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10

			Penggunaan Anggaran							Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran							
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja dilakukan secara berkala	100.000.000	4 kali	Sekretariat	15	30	45	10
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Evaluasi kinerja anggaran terhadap sasaran strategis belum optimal	100.000.000	2 kali	Sekretariat	15	30	45	10
		1.3	Persentase Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah	%	80,78	5	25	30	20,78	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pelaksanaan tugas ASN belum optimal	243.500.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Masih minimnya pegawai yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kinerja ASN	387.000.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Peningkatan capacity building bagi pegawai terhadap peraturan terkait kinerja ASN	500.000.000	4 kali	Sekretariat	20	15	45	20
										Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Masih minimnya ASN yang mempunyai kompetensi berkaitan dengan kinerja ASN	530.026.463	2 kali	Sekretariat	20	15	45	20
21	Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Layanan Berbasis Teknologi Informasi	%	62,34	10	20	20	12,34	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Masih rendahnya penggunaan digitalisasi dalam SPBE	16.246.600.000	4 kali	UPTB Puslia	15	45	30	10
22.	Meningkatnya Kerjasama Layanan Pada e commerce	1.1	Persentase Meningkatnya Kerjasama	%	91,32	10	30	30	21,32	Meningkatnya modern channel	Belum optimalnya kerjasama layanan e commerce pada pembayaran pajak	200.000.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20

23.	Meningkatnya Digitalisasi Pembayaran Pendapatan Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Penggunaan Digitalisasi	%	78,93	15	25	20	18,93	Pengembangan digitalisasi dalam pembayaran pajak daerah	Belum optimalnya layanan berbasis digitalisasi	100.000.000	1 kali	UPTB Puslia	10	50	20	20
24.	Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	1.1	Persentase Meningkatnya Sistem Keamanan Data Informasi	%	41,46	5	10	15	11,46	Pemeliharaan asset tak berwujud	Masih rendahnya tingkat keamanan system informasi basis pajak daerah	600.000.000	2 kali	UPTB Puslia	15	30	30	25
25.	Meningkatnya Kecepatan Internet	1.1	Kecepatan Layanan Internet up to 100 MBPs	MBPs	100	25	25	25	25	Peningkatan akses internet pada blank spot area	Masih terdapatnya blank spot area	5.774.212.000	4 kali	UPTB Puslia	20	35	35	10
26.	Meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah	1.1	Persentase Meningkatnya Realisasi Pendapatan Pajak Terhadap Target	%	100	25	25	25	25	Optimalisasi pendapatan pajak daerah	Masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak daerah	1.074.821.800	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	10	45	35	10
27.	Berkurangnya Tunggakan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Tunggakan Pajak	%	8,87	2	3	2	1,87	Optimalisasi pelaksanaan door to door service	Masih terdapatnya tunggakan dalam pembayaran pajak daerah	1.625.000.000	4 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	20	25	45	10
28.	Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	1.1	Persentase Berkurangnya Kesalahan Perhitungan Dalam Penetapan Pajak Daerah	%	9,72	2	2	3	2,72	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Masih terdapatnya kesalahan perhitungan sesuai dengan NJKB	1.255.000.000	1 kali	UPTB PPD Wilayah Kabupaten Kota se Sumatera Selatan	15	30	45	10

